

CEUREUMÉN

REKONSTRUKSI ACEH

NO. 33 ■ 9 NOVEMBER 2006 ■ DUA MINGGUAN

http://www.e-aceh-nias.org/media_center/newsletter.aspx

PANTON

Aneuk Leuk meusu ateu u gadeng
Aneuk peureuleng si judo dua
Hai syedara Apa ngon Polem
Aceh ta sandeng ngoen nanggroe lua

Moto geureubak dijak u Tangse
Tip uroe sabe peuding boh mulieng
Buleuen dua blah beujeulah ta pike
Peumilu lahe pileh peumimpin

Peuraho raya bungka u pulo
Ji peuding anoe ngon moto jungkat
Ramee kandidat ubat jipublo
Tugah geutaryoe pileh yang teupat

Bak buleuen duablah peujeulah tempo
Pileh raja nanggroe di Aceh mulia
Nyoe salah pileh seudeh ngon rugo
Limong thon tempo seungkak lam dada

NURMAN SYAMHAS

2



Gelapnya Bantuan
Tanggap Darurat

3



Lambung, Calon
Desa Percontohan

7



Takut Abrasi
di Kuala Jeumpa



Belum Sempat Memikir Pilkada

Dina Damayanti

Aceh Besar
Dina_yanti01@yahoo.com

Sebagian pengungsi di Aceh mengaku tidak begitu peduli dengan makin dekatnya pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh pada Desember mendatang. "Kami sekarang lebih memikirkan kemana akan tinggal, karena hingga saat ini belum mendapatkan rumah," kata Aminah (32) pengungsi barak Kahju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. "Kami tidak memikirkan soal pilkada karena masih di barak, apalagi kondisi ekonomi belum membaik," kata Habibah (50). Saat ini masih ada ratusan pengungsi di barak Kahju. Karena belum mendapatkan rumah, kebanyakan dari mereka masih bertahan di barak pengungsian.

Belum terdaftar

Selain tidak begitu antusias, baik Habibah maupun Aminah merasa

belum pernah mendaftarkan diri untuk mengikuti pilkada. "Saya tidak tahu, sudah terdaftar atau belum," kata Aminah lagi.

Selain barak Kahju, banyak pengungsi di beberapa barak pengungsian juga mengaku tidak tahu apakah mereka sudah terdaftar atau belum untuk mengikuti pilkada. Apalagi banyak pengungsi barak yang bukan berasal dari desa tempat mereka mengungsi.

"Kalau terdaftar kita ikut pilih, kalau tidak ya tidak apa-apa," kata Yusri, pengungsi di kawasan Lhoknga, Aceh Besar. Senada dengan pengungsi di Kahju, pengungsi-pengungsi lain lebih suka memikirkan kehidupan mereka. Apalagi banyak pengungsi yang sibuk mencari kerja, terlebih bantuan yang semakin menipis.

Lewat kepala barak

Menurut Kepala Desa Kahju Usman AR, meskipun banyak pen-

gungsi mengaku belum terdaftar, pihaknya sudah mendaftarkan pengungsi di kantor pedesaan sesuai dengan data yang mereka miliki.

"Khusus di Kahju, ada 1.500 orang yang akan ikut pilkada, sebagian besarnya adalah pengungsi," kata Usman. Kepala desa mendapatkan data dari setiap kepala barak. Dan bagi warga yang bukan warga Kahju, tetap akan didaftarkan karena sudah menetap lebih dari setahun. "Khusus di Kahju nanti ada 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) supaya calon pemilih bisa mudah melakukan pencoblosan," kata Usman.

Pendaftaran melalui kepala barak dianggap lebih efektif daripada *door to door*, lantaran banyak pengungsi yang tidak di tempat ketika petugas datang. Para pengungsi sibuk bekerja dan umumnya baru pulang pada sore hari. ■

>> CEK BANUN



>> TIPS KESEHATAN

Demam Berdarah

Musim hujan di Banda Aceh merupakan saat musimnya banyak penyakit. Mulai dari malaria, diare, dan gatal-gatal. Namun demam berdarah dengue (DBD) juga harus diwaspadai karena nyamuk penyebab DBD *Aedes Aegypti* justru hidup di tempat menggenangnya air.

Apa tanda-tanda DBD?

- Panas tinggi mendadak hingga lebih dari 38 derajat Celsius
- Badan terasa lemah dan lesu
- Muncul bintik merah pada kulit (catatan: jika kulit diregangkan tetapi bintik merah tidak hilang, itu bukan tanda DBD)
- Gelisah, ujung tangan dan kaki dingin dan berkeringsat
- Nyeri ulu hati dan muntah
- Mimisan, buang air besar campur darah
- Turunnya jumlah trombosit hingga 100.000/mm³

Bagaimana pertolongan pertama untuk DBD?

- Minum air masak sebanyak-banyaknya
- Kompreskan air hangat pada penderita
- Berikan obat penurun panas

Di mana nyamuk *Aedes Aegypti* hidup?

- 21,9% di ember, drum, tempayan baskom
- 18,7% di barang bekas berisi air
- 17% di vas bunga dan pot berisi air
- 8,7% di lekukan tanah
- 8,3% di terpal atau plastik yang menyimpan air

■ Sumber: Departemen Kesehatan RI

>> KORUPSI

Gelapnya Bantuan Tanggap Darurat

Muhammad Azami

Banda Aceh
Muhammad2004@yahoo.com

Berapa sebetulnya jumlah bantuan untuk Aceh pada masa tanggap darurat pascatsunami? Tidak ada yang tahu pasti. Jumlah organisasi atau instansi lokal, nasional, dan internasional pun yang ikut membantu Aceh belum tercatat pada masa itu. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias baru didirikan pada pertengahan tahun 2005. Begitupun, sebagian bantuan itu ada yang tercatat, khususnya bantuan yang berbentuk uang cash, sedangkan bantuan dalam bentuk barang jauh lebih sulit lagi menghitungnya.

"Jumlah penerimaan saat Aceh masa tanggap darurat pascatsunami sekitar Rp 5,8 triliun. Sebanyak 1,2 triliun bantuan dari dalam negeri, dan sebanyak Rp 4,6 triliun bantuan dari luar negeri," kata Koordinator GeRAK Aceh, Akhiruddin Mahyudin.

Uang sebanyak itu, kata Koordinator Gerakan Antikorupsi Aceh itu, disalurkan melalui Bakornas, satu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan bantuan selama masa tanggap darurat pascatsunami di Aceh. Lalu, berapa banyak bantuan

dalam bentuk barang? Udin mengaku pihaknya mempunyai data, namun hingga kini belum mampu mengonversikan dalam bentuk rupiah.

Nah, salah satu bantuan yang dinilai oleh GeRAK 'masih gelap' dalam penyalurannya adalah bantuan dari Jepang yang disalurkan melalui Japan International Cooperation System (JICS) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. BRR dinilai GeRAK sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab.

Beberapa waktu lalu, Jurubicara BRR Mirza Keumala memang telah membantah tuduhan itu. Kata Mirza kepada sejumlah media massa, bantuan yang disalurkan Pemerintah Jepang melalui JICS bukan dalam bentuk uang, tapi bantuan barang dan jasa. "BRR tidak bersentuhan dengan satu sen Dollar dan Yen pun. Bantuan yang disalurkan JICS tersebut pada masa tanggap darurat atau sebelum BRR Aceh-Nias terbentuk," katanya. Namun, Udin membantah Mirza. "Pernyataan BRR itu sangat salah. Betul itu bantuan tahun 2004, tapi pengelolaannya itu tahun 2005."

Udin bahkan mengaku dirinya mencatat tanggal ditransfer dana itu. Tansfer pertama, katanya, pada 18 April 2005. Transfer ked-

Dua pengungsi Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, sedang menghitung botol sirup bantuan di barak mereka. Pertanggungjawaban bantuan pada masa tanggap darurat di Aceh masih dipertanyakan banyak pihak.



ua pada 8 Juni 2005, dan transfer ketiga pada 28 Juni 2005. Lalu, ke mana dana tersebut ditransfer? "Di Transfer ke Bank of Tokyo," ungkapnya.

Siapa pula yang menyalurkan? Menurut Udin, penyalurnya banyak, mulai dari departemen tingkat kementerian hingga BRR. Nah, sebanyak Rp 258,1 miliar di antaranya merupakan tanggung jawab BRR. "Hasil temuan kita sebanyak Rp 258,1 miliar merupakan tanggung jawab BRR," katanya.

Dikatakan, hasil audit BPK juga menunjukkan bahwa penyaluran dana Rp 258,1 miliar itu tidak di

sertai adanya DIPA pengesahan, juga tidak ada kontrak. "Padahal dalam kronologisnya, Dirjen Perbendaharaan Negara memerintahkan kepada Kanwil PBN dan KPKN khusus untuk mengeluarkan SP2D, SPM, dan SP2D. Itu dikeluarkan oleh KPKN karena adanya persetujuan Deputi Akuntansi dan Anggaran BRR. Jadi, kita tetap melihat bahwa BRR terlibat," katanya lagi. Bukan cuma itu. Udin juga mengaku punya data yang menunjukkan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/pkm.02/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pe-

ngadaan Barang, Jasa, di bawah Pemerintah Jepang untuk bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. "Di situ juga menunjukkan eksekutif agency-nya BRR, yang berkewajiban mengkoordinasikan penyaluran dana hibah itu," jelasnya lagi.

Terlepas siapa pun yang bertanggung jawab, yang pasti bukan cuma sebanyak Rp 258,1 miliar bantuan yang dinilai tak transparan dalam penyalurannya.

Hasil audit BPK menunjukkan bahwa ada triliun rupiah lagi dana bantuan untuk Aceh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada masa tanggap darurat. ■

Lambung, Calon Desa Percontohan

Asri Zaidir

Banda Aceh
Biduan_bisu@yahoo.com

Bahmi Ibrahim (50) kini sudah bernapas lega. Penantiannya selama dua tahun akan berakhir sebentar lagi. Mimpi tidur di rumah baru akan segera terwujud seiring pondasi rumahnya yang sudah tertancap kokoh di atas tanahnya yang terletak di belakang Puskesmas Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

Menurut Bahmi, berdasarkan keterangan dari pengurus desa, bila tidak ada halangan, dia dan keluarga bisa menempati rumah barunya usai lebaran Idul Adha, pertengahan tahun depan. "Ya, senang sekali. Sudah lama saya tinggal di barak," ucap Bahmi sumringah.

Ayah tiga anak ini mendapatkan rumah tipe 36 dengan luas lantai 167 meter, sesuai dengan kesepakatan. Ketika itu ditentukan pembagian tanah berdasarkan luas tanah semula, kendati ada tiga ketetapan. Luas tanah yang disiapkan oleh desa masing-masing seluas 150 meter, 250 meter, dan 300 meter. Dan Bahmi cukup puas dengan yang dia dapatkan. "Sesuai dengan luas tanah saya," ucap Bahmi senang.

Saat ini Desa Lambung memang sedang membangun. Alat berat hilir mudik dari desa yang terkenal sebagai penghasil penganan khas Aceh tersebut. Beberapa lokasi bahkan telah rata dan terbangun pondasi rumah di atasnya.

Menurut Zaidi M Adan, Keuchik Desa Lambung, rencananya di Desa Lambung akan dibangun rumah bantuan sebanyak 309 buah dengan tipe 36 yang dilengkapi fasilitas dua kamar tidur, dapur, dan juga MCK. "Kini sudah naik pondasi sebanyak 242 buah," terang Zaidi.

Pembangunan desa Lambung memang unik. Desa ini mempunyai jalan utama yang sangat luas, lebarnya hingga 15 meter. Ide awalnya muncul berdasarkan keinginan dari masyarakat sendiri untuk mengantisipasi agar kejadian sewaktu tsunami tidak terulang lagi.

Tsunami memang menjadi kenyataan pahit untuk warga desa yang terkenal sebagai penghasil kue khas Aceh tersebut. Lebih setengah warga Desa Lambung menjadi korban dalam kejadian dahsyat akhir 2004 lalu. Menurut Zaidi, penyebabnya adalah warga terjebak dan tak bisa lari ketika ingin menyelamatkan diri.

"Warga tak bisa menyelamatkan diri karena terkepung di dalam desa, sebab desa belum memiliki jalan yang luas. Jalan yang ada masih berupa lorong kecil yang sempit. Kami tidak ingin mengulangi kebobohan yang kedua," ucapnya.

Proses 'mengacak-acak denah' itulah yang membuat pembangunan desa tertunda. "Tata Ruang kami acak-acak sendiri. Beberapa kali kami harus ganti karena ada yang tidak setuju, sampai akhirnya sesuai

dengan keinginan masyarakat," ucap Zaidi M Adan, Keuchik Desa Lambung.

Dari 'mengacak-acak denah' diharapkan Desa Lambung akan menjadi desa percontohan untuk desa yang lain di Aceh. Rencananya, desa ini akan memakai sistem blok dengan jalan-jalan yang besar. Semua rumah memiliki model yang sama: Model rumah Aceh tiang penyangga di bawahnya! "Belum ada di Aceh model desa seperti desa Lambung nantinya," ucap Zaidi bangga.

Tak hanya itu saja. Desa Lambung juga dilengkapi mushala, Gelanggang Olahraga, Puskesmas, dan juga fasilitas pendidikan yang dimulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Untuk sekolah kini sedang dalam pembangunan, dengan dana sumbangan dari RCTI, sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia.

Matangnya perencanaan warga sangat terlihat dengan adanya sebuah gedung berlantai tiga yang berguna untuk tempat menyelamatkan diri bila terjadi bencana tsunami atau banjir. Gedung ini dilengkapi juga dengan tempat pendaratan helikopter di atasnya. Kini, Zaidi sedang merencanakan membangun Gelanggang Olah Raga (GOR). "Dulu sudah ada GOR meski dari bilik, sekarang kami mau bangun yang lebih bagus lagi," ucapnya.

Dengan rencana yang 'seabreg' tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun Zaidi tidak khawatir. Dana yang didapat dari World Bank ini diharapkan bisa mencukupi hingga pembangunan selesai. Begitu juga dengan persediaan lahan. Menurut Zaidi, tidak ada pengurangan maupun penambahan dalam penataan desa yang baru. Semuanya tetap sama, hanya lokasinya saja yang berubah.

Keuchik lulusan Jurusan Sosial Politik ini punya pengalaman menarik saat menentukan denah lokasi. Menurutnya, saat itu ada



Tiga warga sedang memperhatikan sebuah rumah yang hancur akibat tsunami di Desa Lambung, Meuraxa, Banda Aceh. Desa Lambung, Meuraxa, merupakan sebuah Desa Percontohan yang menerapkan master plan desa pembangunan untuk rekonstruksi Aceh.

satu usulan yang dinilainya bisa berakibat fatal. Ketika itu dia meminta warga agar bersedia untuk memberi izin supaya makam keluarga bisa dipindahkan lokasinya. Tanggapan masyarakat ternyata sungguh di luar dugaan. Mereka memberikan izin, mereka bersedia tanah makam untuk dijadikan jalan. "Saya tidak menyangka mereka mengizinkan. Tapi permintaan itu bukan untuk warga saja. Sekdes pun merelakan makam orangtuanya yang terkena jalan dipindahkan," ucap Zaidi terharu.

Zaidi memang tidak menjadi pemain tunggal dalam membangun desa. Semua yang dia kerjakan berdasarkan hasil rapat bersama masyarakat desanya. Untuk proses penggambaran denah saja Zaidi dan warga sudah berulang kali 'duek pakat' untuk menetapkan lokasi rumah baru mere-

ka. "Rapat pertama baru usulan, kemudian rapat selanjutnya baru memulai tentukan denah. Kurang lebih ada empat kali rapat untuk menentukan denah," ucap Zaidi.

Walaupun yang mengerjakan semua masyarakat, namun Zaidi dan warga tidak memakai 'kacamata kuda' dalam membangun desa. Mereka tetap menjalin hubungan dengan Badan Pertanahan Nasional dan P2KP. "Untuk sertifikat kita meminta bantuan BPN. Sedang finishing denahnya kami konsultasikan dengan P2PK," terang Zaidi.

Kini, perlahan-lahan ada perubahan di Desa Lambung. Bangunan berdidinding bata merah sudah mulai terbangun di sana. Tak lama lagi, desa dengan sejuta keunikan ini akan hadir di Banda Aceh dengan nuansa baru. Inilah desa yang mau belajar dari pengalaman. ■

Jangan Abaikan Tata Ruang

Muhammad Azami

Banda Aceh
Muhammad2004@yahoo.com

Rumah yang kini dibangun oleh berbagai donatur untuk warga korban tsunami di Aceh sangat bervariasi, baik dari segi mutu maupun luasnya. Lokasinya pun beraneka ragam. Ada yang masih berani tinggal di pinggir laut, tempat bekas pertapakan rumah lama. Ada juga yang dibangun di lokasi baru, jauh dari areal tsunami 26 Desember 2004 lalu.

Di lapangan juga banyak ditemukan rumah yang dibangun tak

sesuai dengan master plan, yang sangat memperhatikan Tata Ruang.

Tata Ruang adalah pengaturan ruang berdasarkan berbagai fungsi dan kepentingan tertentu, dengan perkataan lain, pengaturan tempat bagi berbagai kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak secara adil. Kini, yang terjadi adalah tumbuhnya kembali kawasan kumuh. Jalan yang dibangun begitu sangat sempit. Tidak ada yang namanya bukit penyelamatan (*escape hill*), sebagaimana diamankan dalam master plan.

"Rumah itu harus sesuai dengan master plan desa yang dibuat bersama. Harus ditata, misalnya harus ada jalan menuju daerah

yang aman (*escape road*). Banyak yang kita temukan, kadang-kadang mobil pemadam kebakaran saja tidak bisa masuk," kata Dr Nazamuddin, pakar Ekonomi dari Unsyiah, beberapa waktu lalu. Itu sebabnya, seorang pemerhati Tata Ruang menyebutkan bahwa Desa Lambung kelak bisa menjadi contoh bagaimana seharusnya sebuah desa dibangun. Namun, seperti dikatakan Zaidi M Adan, Keuchik Desa Lambung, tidak mudah untuk sekadar mewujudkan master plan desa: Butuh kesabaran tinggi, kerja keras, dan keikhlasan memberi dan menerima. ■

REDAKSI CEUREUMeN



Pemimpin Umum: Sim Kok Eng Amy ■ **Sekretaris Redaksi:** Siti Rahmah ■ **Redaktur/Wartawan:** Nani Afrida, Mohammad Avicenna, Muhammad Azami ■ **Koordinator Artistik:** Maha Studio ■ **Fotografer:** Hotli Simanjuntak ■ **Bagian Keuangan:** Atik Hidayati ■ **Bagian Umum:** Ratnasari Dewi, Andi Yoga Tama ■ **Bagian Sirkulasi:** Surya Windu ■ Dengan kontribusi wartawan lepas di Aceh ■ **Alamat:** Jl. Prada Utama No: 11 A. Gampong Prada, Banda Aceh. PO BOX 061 Banda Aceh 23001. Email: ceureumen@gmail.com ■ Percetakan dan distribusi oleh *Serambi Indonesia*.

CEUREUMeN merupakan media dwi-mingguan yang didanai dan dikeluarkan oleh Decentralization Support Facility (DSF atau Fasilitas Pendukung Desentralisasi). DSF merupakan inisiatif multi-donor yang dirancang untuk mendukung kebijakan desentralisasi pemerintah dengan meningkatkan keterampilan dan efektivitas dukungan dari para donor pada setiap tingkatan pemerintahan. Misi dari CEUREUMeN adalah untuk memberikan informasi di Aceh tentang rekonstruksi dan berita yang bersifat kemanusiaan. Selain itu CEUREUMeN diharap bisa memfasilitasi informasi antara komunitas negara donor atau LSM dengan masyarakat lokal.

>> SUARA RAKYAT KECIL



Isi

Hati Korban Tsunami

Kami korban tsunami yang sudah sembilan menetap di barak Desa Glumpang Payong. Memang selama ini sudah ada memperoleh bantuan rumah dari dua pendonor yakni Mammamia dan Rekompak. Bantuan seperti perahu, jaring dan sejumlah perlengkapan melaut lainnya juga kami, terima kasih dunia.

Tapi yang sangat kami sayangkan adalah sikap dari BRR sendiri yang hingga detik ini tidak pernah menyempatkan diri untuk "singgah" apalagi membantu ala kadarnya bagi kami. Padahal kami sangat butuh modal usaha untuk melanjutkan usaha kami ke depan.

Menjelang dua tahun tsunami, kehidupan kami semakin sulit, berjualan merupakan jalan satu-satunya untuk menyambung hidup. Terima kasih atas perhatian *Ceureumen* yang sudah memberitakan kesedihan kampung kami.

Aiyub
Nelayan Kuala Jangka
Kecamatan Jeumpa, Bireuen

Soal Atribut Pilkada

Saya mengucapkan selamat kepada para kandidat gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati yang sudah ditetapkan sebagai calon. Anda adalah calon pemimpin Aceh ke depan. Anda harus banyak bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat yang sudah memilih dan mempercayai tuan-tuan semua.

Di sana saya tidak banyak berharap. Saya yakin Anda yang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari tentu sudah siap lahir batin. Baik itu dari soal dana maupun tenaga. Makanya tak mengherankan bila ada kandidat yang punya dana besar sanggup menyewa tempat besar-besaran untuk memapang wajahnya di jalan-jalan utama, contohnya seperti di depan Pante Pirak.

Bukan hanya itu, di tempat-tempat lain juga ada. Saya yakin, untuk melakukan hal tersebut butuh dana yang tidak sedikit. Yang menimbulkan pertanyaan saya, dari mana nanti Anda akan menarik kembali—untuk mengembalikan modal kampanye—jika anda terpilih sebagai walikota atau pun gubernur.

Mungkin saja masyarakat juga harus bisa menilai dengan jernih siapa sebenarnya yang layak pemimpin kita. Yang punya dana besar, sehingga untuk mengembalikan modal harus melakukan korupsi atau yang dananya pas-pasan. Semua tentu terpulung pada semua pemilih.

Hanya saja, saya menyarankan agar kita pemilih bisa bersikap hati-hati. Tapi, semua terserah anda, tapi seperti sebuah bunyi iklan layanan masyarakat: Kekayaan jangan mempengaruhi pilihan Anda.

Bukan miskin, bukan kaya, bukan penebar pesona dan bukan pandai bicara, tapi bagaimana dia mengakomodir hak-hak kita. *Meuriri uroe tak ikat beunteng, meuriri ureung jeut tapilih keu radja.*

Anshari

Peunayong, Kuta Alam

Banda Aceh
Buat Anda yang ingin menyampaikan *Suara Rakyat Kecil* berupa ide, saran, dan kritik tentang rekonstruksi bisa melalui surat ke

Tabloid CEUREUMEN
PO Box 061 Banda Aceh 23001
email: ceureumen@gmail.com

Tabloid *Ceureumen* membuka rubrik "Komentar Anda". Rubrik ini mengundang partisipasi pembaca untuk memberi komentar terkait dengan topik yang akan kita bahas per edisi.

"Komentar Anda" akan hadir setiap dua edisi atau setiap edisi bermomor genap *Ceureumen*. Anda bisa mengirim pendapat ke nomor 081360044730 dengan menulis komentar_isi komentar Anda, serta alamat tempat tinggal Anda. Komentar Anda bisa juga dikirim melalui email: ceureumen@gmail.com, atau lewat surat ke PO Box 061 Banda Aceh 23001.

Kemana Melapor jika Terjadi Pelanggaran?

Mohammad Avicenna dan
Muhammad Azami

Banda Aceh
sjechsyoh@yahoo.com

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan pemilihan, itu dianggap sebagai pelanggaran. Juru Bicara Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan) Aceh, Buchari HYSH mengatakan, yang berhak melapor pelanggaran dalam Pilkada ini adalah semua penduduk Aceh yang terdaftar sebagai pemilih, pemantau pemilihan, dan pasangan calon atau tim kampanyenya.

Bagaimana cara melapor?

Anda dapat melaporkan setiap pelanggaran Pilkada 2006 melalui:

- Surat dan/atau datang langsung ke setiap kantor Panitia Pengawas Pemilihan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Alamat : Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Aceh
Jalan Teungku Lam U No 18 Kampung Pineung, Kota Baru, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
e-mail : fafad24@yahoo.co.id



Sebuah poster besar berisi janji salah satu calon gubernur Aceh terpanjang di Simpang Surabaya, Banda Aceh. Masyarakat harus mangawasi setiap janji kandidat yang bernuansa bombastis untuk menarik simpati massa.

SMS : 085260799578
Telp : 0651-7551833
Fax : 0651-7551832

Periode Pelaporan Pelanggaran

Laporan secara lisan/tulisan harus diserahkan paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilihan. Lalu, bagaimana sebenarnya cara menghitung harinya? Caranya adalah, "Hari pertama dikecualikan dan hari terakhir dimasukkan." Misalnya, jika pelanggaran dilakukan pada 2 November tahun 2006, hari terakhir untuk memastikan laporan harus pada 9 November 2006. Sebuah laporan yang dimasukkan pada 10 November 2006, maka akan dianggap dilaporkan di luar batas waktu dan tidak

akan diproses. Lalu, kemana pula harus menyerahkan laporan? Laporan harus diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan pada wilayah kerja yang bersangkutan yang sudah ditunjuk untuk menerima laporan pelanggaran atas setiap proses pada setiap tahapan dari penyelenggaraan pemilihan.

Sengketa Hasil Pemilihan

Sengketa hasil pemilihan bukanlah wewenang Pengawas Pemilihan, melainkan wewenang Mahkamah Agung. Si pelapor harus memasukkan permohonannya kepada Mahkamah Agung dalam waktu 3 x 24 jam sesudah pengumuman KIP tentang penetapan hasil pemilihan.

Aturan Berkampanye

Tujuan kampanye adalah untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon guna mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon pada saat pemungutan suara. Dalam pelaksanaannya, kerap kali para kandidat melanggar sejumlah aturan dalam berkampanye. Ada beberapa poin penting yang bisa menjadi rujukan melanggar atau tidak kampanye yang dilakukan oleh seorang calon. Aturan tersebut sesuai dengan Qanun Nomor 7 tahun 2006 dan peraturan KIP.

1. Kampanye dilaksanakan di tempat-tempat yang dapat dihadiri oleh masyarakat secara bebas.
2. Kampanye tidak boleh diadakan di tempat-tempat ibadah, pendidikan, kantor pemerintah, dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.
3. Apabila kampanye dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, tempat kampanye antara satu calon dengan calon lainnya harus berjarak minimal 2 kilometer.
4. Dalam berkampanye, pasangan calon dan tim kampanye dilarang melibatkan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
5. Pasangan calon dilarang melibatkan PNS, anggota TNI, anggota Polri, sebagai peserta kam-

panye dan juru kampanye dalam pemilihan. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. ■

Berhak Mengajukan Keberatan

Jika merasa keberatan dengan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP nantinya, maka ada hak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan. Namun, keberatan ini hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung (MA) dalam waktu paling lambat tiga hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan. Keberatan itu pun hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Dan MA akan memutuskan sengketa hasil perhitungan suara paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan. ■



Puluhan jurnalis Aceh sedang mengadakan pertemuan dengan anggota KIP seputar persoalan Pilkada, di Media Center KIP Aceh, Banda Aceh. Peran media sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pilkada yang jujur dan adil di Aceh.

Ayo, Pantau Pilkada

Muhammad Azami

Banda Aceh
Muhammad2004@yahoo.com

Selain LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau organisasi lain, pemantauan pemilihan kepala daerah juga harus dilakukan oleh individu secara sukarela. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan ketetapan-ketetapan dipatuhi, sehingga tercipta suasana pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Qanun No.7 tahun 2006, untuk mengawasi pemilihan yang diselenggarakan oleh KIP, maka telah dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh. Ini adalah institusi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh KIP Aceh. Panitia pengawas ini mempunyai wewenang antara lain mulai dari mengawasi semua tahap penyelenggaraan pemilihan, sampai dengan penyelesaian

sengketa yang timbul dalam pemilihan. Namun, bagaimana pun, mereka punya keterbatasan. Itu sebab pengawasan harus dilakukan bersama-sama sesuai dengan aturan main yang telah dibuat.

Pemantauan pemilihan dapat dilakukan pada setiap tahapan pemilihan meliputi: Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pengesahan dan pelantikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan yang lebih komprehensif oleh semua pihak sejak dini. Dengan demikian, yang terpilih kelak menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari 19 Kabupaten/Kota, benar-benar sesuai dengan harapan rakyat banyak.

Dan bagaimana pun, pemantauan pemilihan harus tunduk pada kode etik pemantau pemilihan. (Baca: Kode etik Pemantau Pemilihan)

Kode Etik Pemantau Pemilihan

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilihan dalam melaksanakan Pemantauan Pemilihan:

1. Nonpartisan dan netral. Pemantau menjaga sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak. Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.

2. Nonviolence

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan. Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia.

4. Volunteeristic. Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, menghadiri briefing, pelatihan atau lokakarya yang diadakan oleh lembaga pemantauannya dan bersedia mengembalikan semua atribut lembaga pemantauannya jika diminta kembali oleh lembaga yang menugasinya dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas. Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan dan pemilih.

6. Kejujuran. Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif. Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif. Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan pemilihan dalam melaksanakan

tugas pemantauannya.

9. Transparan. Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan. Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KIP Provinsi NAD, KIP Kabupaten/Kota;

11. Kemandirian. Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharuskan pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau pemerintah daerah;

12. Komprehensif dan relevan.

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan, yang keseluruhannya dilaporkan kepada KIP Provinsi NAD, KIP Kabupaten/Kota. ■

Jenis Pelanggaran Pemilihan

Sesuai dengan pengalaman, jenis-jenis Pelanggaran pemilihan yang diprediksikan akan terjadi:

A. Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan Suara.

1. Memberikan keterangan palsu yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih.
2. Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
3. Memalsukan surat atau dokumen yang diperlukan untuk pemilihan.
4. Menggunakan atau memaksa orang lain untuk menggunakan surat atau dokumen yang diketahui telah dipalsukan.
5. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi pihak lain untuk terdaftar sebagai pemilih.
6. Melakukan kecurangan dengan menyesatkan seseorang atau menjanjikan imbalan untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan pasangan calon.
7. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan kampanye.
8. Melanggar larangan untuk merusak alat peraga/kampanye parpol/peserta pemilihan, atau larangan menggunakan tempat ibadah/pendidikan dalam kampanye.

9. Melakukan kampanye di luar jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh KIP untuk masing-masing peserta pemilihan.

10. Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilihan.

11. Memberi atau menerima dana kampanye yang melebihi batas yang ditentukan.

12. Menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang.

13. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilihan.

B. Jenis Pelanggaran Pemilihan pada hari Pemungutan Suara

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalangi seseorang untuk melakukan haknya sebagai pemilih.

2. Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lain kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilihan tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.

3. Memalsukan identitas diri pada saat pemungutan suara.

4. Memberikan suara lebih dari sekali di satu atau lebih TPS.

5. Dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.

6. Majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerjaannya untuk memberikan suara.

7. Melanggar aturan mengenai pendampingan bagi pemilih penyandang cacat.

8. Pendamping pemilih penyandang cacat yang membocorkan pilihan si pemilih penyandang penyandang cacat/keterbatasan fisik.

C. Jenis Pelanggaran Pemilihan pascapemungutan Suara.

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan peserta pemilihan tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.

2. Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.

3. Karena kelalaiannya, menyebabkan rusaknya atau hilangnya hasil penghitungan suara yang sudah disegel.

4. Dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. ■



>> INFO

Di Mana Bisa Mendapatkan *Ceureumén*

Untuk pembaca yang berdomisili di Aceh Barat Daya – Aceh Selatan – dan Aceh Tenggara, Anda bisa mendapatkan tabloid ini di:

Puskesmas Babah Rot
Kecamatan Babah Rot–Aceh Barat Daya
Hub: Dr. Ikhsan M

Puskesmas Kuala Batee
Ds. Blang Makmur–Kecamatan Kuala Batee
Aceh Barat Daya
Hub: Dr. Risma Lisa Fitri

Puskesmas A.S. Pinang
Blang Pidie–Aceh Barat Daya
Hub: Dr. Andi Syahputra

Puskesmas Susoh
Ds. Padang Baru–Kecamatan Susoh
Aceh Barat Daya
Hub: Dr. Teuku Muda Putee

Masjid Agung Blang Pidie
Aceh Barat Daya
Hub: H. Burnisal

Masjid Al Furqon
Kecamatan Susoh–Aceh Barat Daya. Hub: H. Hasyim Sulaiman

Puskesmas Labuhan Haji
Ds. Manggis Harapan–Kec. Labuhan Haji
Aceh Selatan
Hub: Dr. Iskandar Yakhdan

Puskesmas Peulumat
Kecamatan Labuhan Haji Timur Aceh Selatan
Hub: Bp. Darman, Amk—Tgk. Badaruddin

Puskesmas Meukek
Kecamatan Meukek–Aceh Selatan
Hub: Dr. Yurnalis YunusBp. Mawardi Wahab

Puskesmas Sawang
Kecamatan Sawang–Aceh

Selatan
Hub: Dr. Rudy Hartono- Ibu Nelly

Puskesmas Sama Dua
Kecamatan Sama Dua–Aceh Selatan
CP: Ibu Nur Hafni
Dr. H. Syafrizal

Puskesmas Blang Kejeran
Jl. Nasional Tapak Tuan – Blang Pidie
Kecamatan Labuhan Haji Barat Aceh Selatan
CP : Dr. Neng Rohaeni D.

Puskesmas Air Berudang
Kecamatan Tapak Tuan – Aceh Selatan
CP : Dr. Zulfadli
Ibu Nur Azmi

Masjid Agung Istiqomah
Kota Tapak Tuan – Aceh Selatan
Hub: Bp. Ali Akbar- H. Rizal, S.H.

Puskesmas Ladang Rimba
Kecamatan Trumon Timur – Aceh Selatan
Hub: Dr. Mawarzi Sofyan

Ibu-ibu PKK & Dharma Wanita
Kantor Camat Simpang Kiri
Jl. Teuku Umar – Subulussalam Aceh Singkil

Dharma Wanita Persatuan
Kantor Camat Sutan Daulat Jambi – Aceh Singkil
Hub: Bp. Camat Asmardin

Ibu-ibu PKK & Dharma Wanita
Kantor Bupati Aceh Tenggara Kutacane – Aceh Tenggara
Hub: Ibu Hj. Bahagia Martin Desky— Ibu Sri Astuti

Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenep (STAISES)
Jl. Pelajar, Kutacane – Aceh Tenggara
CP : Bp. Sukarman
Delvia Fidona

Puskesmas Kota
Kecamatan Babussalam – Aceh Tenggara
CP : Dr. Indrawansyah
Ibu Sujannah

Masjid Taqwa
(Depan Lapangan Ahmad Yani)
Kutacane – Aceh Tenggara
CP : Bp. Asaluddin Pinem

STIT Gunung Lauser
Jl. Iskandar Muda No.1
Kutacane – Aceh Tenggara
CP : Arba'i

Perguruan Tinggi Gunung Lauser (PTGL)
Jl. Iskandar Muda No.1
Kecamatan Babussalam – Kutacane
CP : Bp. Alyas SKD (Kelapa Gading – Kec. Babel, Kutacane)

Puskesmas Perawatan Plus Biak Muli
Kecamatan Babel – Aceh Tenggara
CP : Ibu Zunaida
Dr. Suhelman

Rumah Sakit Umum (RSU) Sahuddin
Jl. Kutacane – Blang Kejeran Kutacane – Aceh Tenggara
CP : Drg. Agus Pramono

Kantor PPK di Hotel Mardatilah
Gayo Lues
CP : Ir. Yusferizal
Nazamuddin Arbi

Kantor PPK Blang Pidie
Aceh Barat Daya
CP : Ir. T.Jasman
Dhr. Iqrawati

Kantor PPK Aceh Tengah
Jl. Yos Sudarso, Lorong Bulok No. 282
Balang Kolak2-Dusun Tengah RT 02
CP : Iswandi

>>> TANYA JAWAB

Listrik bagi Korban Tsunami

Apakah kami korban tsunami harus membayar sejumlah tertentu agar PLN mau memasangkan aliran listrik ke rumah kami. Mohon penjelasan, bagaimana sebetulnya aturannya. Soalnya, di lapangan ternyata banyak yang meminta uang kepada kami.

Sulaiman Idris
Lhoknga, Aceh Besar

General Manajer PT PLN (Persero) Wilayah INAD, Ir Syarifuddin Ibrahim menyatakan, pemasukan arus listrik dan meteran baru ke rumah korban bencana gempa dan tsunami tidak dikutip biaya apa pun. Seluruh biaya pemasangan listrik sudah ditanggung oleh BRR, kecuali untuk pemasangan instalasi lampu dalam rumah. Ini menjadi tanggung jawab pemilik rumah. Jika pun masih ada instalatir yang memungut biaya pemasangan meteran baru dan pemasukan arus listrik ke rumah korban bencana gempa dan tsunami, pemilik rumah diminta tidak memberikannya. Kalaupun dipaksa, dia meminta untuk melaporkannya kepada polisi.

Jumlah Rumah yang Dibangun BRR

Kami ingin mengetahui berapa sebetulnya jumlah rumah yang telah selesai dibangun oleh BRR. Karena kalau tidak ada rintangannya apa-apa, maka pada 26 Desember ini dua tahun sudah tsunami berlalu. Tetapi, saya melihat tak banyak rumah yang dibangun oleh lembaga itu. Terima kasih kepada Ceureumen yang bersedia mencari jawaban ke BRR.

Zamanhuda
Kahju, Aceh Besar

Menurut Jurubicara BRR Tuanku Mirza Keumala, BRR telah menyelesaikan sebanyak 3.400 unit rumah pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 BRR sedang mengerjakan sebanyak 10.405 unit rumah.

Ini termasuk paket rumah yang telah dibuat kontrak maupun yang sedang dikerjakan pembangunannya. Sedangkan total rumah yang telah selesai dibangun oleh berbagai donatur mencapai 44.000 unit.

Anda bisa mengirimkan pertanyaan apa pun yang ingin Anda ketahui, terutama mengenai masalah rekonstruksi dan rehabilitasi. Redaksi akan mencari jawaban untuk pertanyaan Anda. Kirimkan ke **PO BOX 061 Banda Aceh 23001** atau email ceureumen@gmail.com dengan mencantumkan "Rubrik Tanya Jawab"



TEKA TEKI SILANG CEUREUMEN No. 33

1			2		3		4
		5					
6					7		
		8					
9					10		11
		12		13			
14							

Mendatar:

1. Penyakit Gula
5. Perbuatan untuk menyenangkan hati
6. Ukuran luas
7. Zat ringan
8. Gelombang kecil
9. Dan (Inggris)
10. Harapan
12. Syair kepahlawanan
14. Angkutan

Menurun:

1. Keterangan
2. Nama ular
3. Cekatan
4. Penedap makanan
5. Bebas, Berdiri sendiri
9. Mengikuti, Memeluk suatu Agama
11. Bagian dari pohon yang bawah
13. Satuan berat

Pengumuman pemenang TTS akan diumumkan setiap dua edisi berikutnya. Jawaban di kirim ke Po.Box 061 Banda Aceh. Kepada 5 (lima) pemenang akan mendapatkan kamus Bahasa Indonesia-Inggris.

Takut Abrasi di Kuala Jeumpa

Desi Saifan

Bireuen
desi_saifan@yahoo.com

Letak Desa Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sangat strategis. Sedikitnya ada 390 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami desa ini setelah tsunami. Sebelumnya, hanya 319 KK saja. Mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai nelayan, sedangkan pekerjaan lainnya seperti wiraswasta atau pegawai pemerintah, bisa dihitung dengan jari jumlahnya.

Pendidikan mereka juga tidak tinggitinggi amat. "Kebanyakan sih tingkat SMP, sedang perguruan tinggi satu dua orang saja," kata Keuchik Desa Kuala Jeumpa, Sukirman Abidin Rahman, kepada *Ceureumen* belum lama ini.

Mendapat bantuan

Sukirman menuturkan bahwa saat tsunami hampir dua tahun silam, sedikitnya 88 unit rumah warga rusak total. Sedangkan yang rusak ringan hampir sebagian penduduk desa mengalaminya. Belum lagi harta benda termasuk binatang peliharaan masyarakat saat itu. "Syukurlah, tak lama mendiami barak, warga sudah mendapat bantuan rumah dari pihak donatur," kata dia.

Bantuan rumah tipe 42 yang berjumlah 25 unit sudah diterima warga dari donatur. Sedangkan bantuan tahap dua sebanyak 88 unit rumah tipe 36 mereka terima dari donatur lainnya. Tipe rumah bantuan yang

berbeda tidak menjadi persoalan bagi mereka. Namun, ada masalah lain yang mengganggu pikiran nelayan setempat.

Apalagi saat hasrat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pinggir laut untuk kembali hidup normal terus mencuat. Sukirman mencontohkan kualitas tanggul di bibir Kuala Jeumpa yang menjadi masalah bagi mereka.

Kuala dangkal

Pasalnya, pembangunan kuala hanya dikeruk beberapa meter ke dasar laut. Selain itu, tanggul yang dibuat tidak kokoh, tidak ada ikatan batu-batu sungai seperti lazimnya. "Normalnya, kedalaman pengerukan dari permukaan air adalah tiga meter," kata Husaini, nelayan setempat kepada *Ceureumen*. Akibatnya, ya bisa dibayangkan: Tanggul bisa roboh oleh abrasi. Abrasi adalah pengikisan tanah yang terjadi oleh air laut.

Sebelum tsunami, para nelayan memperkirakan ada sekitar 60 jenis boat kecil dan 12 perahu besar milik nelayan yang beroperasi di Kuala Jangka. Pascatsunami, yang tersisa hanya sekitar 60 persen atau 36 unit saja. Hal itu sangat mempengaruhi omset nelayan setempat. Bila dulunya penghasilan Rp 300 hingga Rp 400 ribu per bulan bisa mereka peroleh, kini hanya setengahnya saja.

Saat ini kondisi abrasi yang melanda Kuala Jangka sudah semakin parah. Gempuran ombak saban hari bisa menjebolkan apa pun yang membatasinya, termasuk



Tempat Pendaratan Ikan yang rentan abrasi.

tanggul yang tak kokoh. Tinggi air di permukaan hanya lebih kurang tiga meter.

Bakal ambruk

Bukan tidak mungkin beberapa waktu lagi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang cukup dekat dengan bibir kuala akan dikeruk ombak yang telah menggerus tanggul tersebut. Nelayan mengaku boat yang tidak melaut saja kini mereka pindahkan ke

tempat yang lebih aman.

Tak ayal, pembangunan landing dock, shelter, dan latrine plus pengerukan bibir kuala hanya menjadi proyek mubazir dan tak berguna saja. Nelayan sangat menyayangkan sikap dari BRR sendiri yang hingga detik ini tidak pernah memantau pembangunan proyek itu dan mengabaikan nasib korban tsunami setempat. ■

>> KANDIDAT



Malik Raden ■ Calon Gubernur Aceh:

Siap Bertarung untuk Pilkada Damai

Mounaward D. Ismail

Banda Aceh
sjechsyo@gmail.com

Sepak terjang tokoh Pendidikan Aceh ini sudah tak perlu diragukan lagi. Pada Pemilu Legislatif 2004 lalu dia meraup suara yang amat signifikan dalam meraih posisi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, pada akhir tahun 1999 Malik pernah gagal menduduki kursi Gubernur Aceh ketika dia kalah bersaing dengan Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh yang kini dipenjara setelah dibuktikan terlibat dalam kasus korupsi. Dan kini, anggota DPD ini

kembali mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Aceh. Apa saja komitmennya untuk membangun Aceh bila nanti terpilih sebagai orang nomor satu di Tanah Rencong ini? Berikut paparan singkat Malik Raden kepada *Ceureumen*.

Apa target Anda jika terpilih sebagai gubernur Aceh nanti?

Target yang paling penting adalah memelihara perdamaian itu agar tidak terganggu lagi. Lalu, memprioritaskan agenda-agenda untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak agenda politik yang sudah dilakukan supaya Aceh ini aman dan bisa dibangun kembali. Kita berharap setelah Pilkada, kita mulai lagi dengan agenda bagaimana membawa masyarakat Aceh ini kepada sebuah kemakmuran dan kesejahteraan. Dari situ, bagaimana memajukan pendidikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menciptakan lapangan kerja supaya perekonomian masyarakat lebih baik ke depan.

Dari elemen mana saja yang menjadi konstituen Anda?

Kalau pasangan kami jelas ingin mendapat dukun-

ngan dari semua elemen masyarakat di semua kabupaten-kota di Aceh. Kalau terpilih juga kita akan bekerja keras untuk semua wilayah dan juga untuk kepentingan semua kelompok masyarakat. Maka oleh karena itu dukungan yang diharapkan juga dari semua komponen ini.

Anda dulu memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu legislatif 2004, apa ini yang mendorong Anda untuk bertarung dalam Pilkada kali ini?

Hasil pemilu itulah dorongan utamanya. Dari 27 calon, nomor urut saya juga paling bawah yakni 26. Namun, saya memperoleh suara mayoritas dengan selisih suara yang cukup besar antara pemenang di bawah saya. Itu memang yang menjadi landasannya sehingga memicu saya untuk maju. Memang, selain mendapat dukungan yang besar dari masyarakat juga memperoleh dukungan yang kuat dari berbagai partai politik yang ada.

Seperti apa komitmen Anda dalam memberantas KKN di Aceh jika terpilih sebagai gubernur?

Tentu saya ingin semua aparat pemerintah bekerja dengan bersih dalam penye-

nggaran pemerintahan yang baik. Lebih konkritnya akan kita jabarkan lagi nanti.

Komentar Anda mengenai penerapan syariat Islam di Aceh?

Saya pikir sekarang ini sudah berjalan, kita inginkan prosesnya ke depan bisa berjalan lebih baik dan pola penerapannya dimaksimalkan lagi ke depan.

Apa harapan Anda lainnya?

Kita ingin pilkada ini terselenggara dalam suasana damai dan tidak ada gejolak serta gesekan apa pun menjelang pemungutan suara. Kita berharap masyarakat juga siap menerima siapa pun yang menang dan kalah. Intinya, jangan ada kelompok masyarakat yang membuat kericuhan pada saat jagoannya kalah. Sebab, saya yakin KIP dan pemerintah ingin menyelenggarakan Pilkada secara damai dan jujur.

Lantas, kalau Anda sendiri bagaimana?

Kalau saya, siap untuk menang, tapi siap juga untuk kalah. Tentu saja, kalau menang punya tanggung jawab yang cukup besar. Kalau kalah berarti kami belum mendapat kepercayaan dari masyarakat. Meski demikian, kita juga akan memberikan

dukungan kepada orang yang menang. Sebab, siapa pun orangnya, lima tahun ke depan dia yang akan pimpin daerah ini. ■



Data Singkat

Nama Lengkap : Drs. H. A. Malik Raden, MM
Lahir : Aceh Besar, 17 Agustus 1945
Pekerjaan : Anggota DPD-RI/MPR-RI

Trauma yang Setara dengan Afganistan



Beberapa anak TK sedang belajar membaca huruf Arab di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. Terapi agama adalah terapi yang efektif untuk menghilangkan trauma masyarakat pascakonflik dan tsunami.

Dina Damayanti
Banda Aceh/ Aceh Besar
Dina_yanti01@yahoo.com

Nurhayati (29) – bukan nama sebenarnya – warga Desa Siron Kecamatan Indra Puri, Aceh Besar, mengaku mulai lega. Perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia telah membawa perubahan

bagi keluarganya. Ya, suaminya Hasbi (35) – bukan nama sebenarnya – kini sudah mulai sembuh dari traumanya.

“Kalau dulu, jangankan keluar untuk mencari rezeki, kumpul-kumpul dengan teman di warung kopi saja takut. Takut terjebak kontak senjata,” kata perempuan itu sambil tersenyum.

Hasbi memang sempat berkurang diri di rumah berbulan-bulan saat konflik di Aceh. Desa Siron memang dikenal sebagai kawasan hitam tempat acap kali adu peluru antara pihak bertikai.

Menurut Nurhayati, trauma yang dialami suaminya bermula saat sedang bekerja di sawah dan terjebak karena kontak senjata selama setengah jam.

Sejak saat itu Hasbi tidak berani kemana-mana lagi, sehingga Nurhayati lah yang mengambil alih pekerjaan Hasbi. Nurhayati bekerja di sawah, sementara Hasbi menjaga anak-anak. “Kalau terdengar sedikit suara peluru, maka sekujur tubuh suami saya akan menggigil dan keluar keringat dingin,” ceritanya.

Kini dengan perjanjian damai, Hasbi mulai hidup normal. Dia mulai berani turun ke sawah dan juga berkumpul dengan rekan-rekannya di desa atau di warung kopi.

Mimpi buruk
Berbeda dengan Hasbi, trauma yang mendalam juga dialami oleh Abdullah (25), pemu-

da asal Pidie. Sewaktu konflik sedang panas-panasnya tahun 2000, dia kehilangan sang ayah.

Dengan mata kepalanya sendiri dia melihat sang ayah diambil oleh salah satu kelompok bertikai dan dibawa entah kemana. Dia tidak tahu nasib ayahnya setelah itu. “Kami sekeluarga sudah mencari kemana-mana, tetapi tidak pernah mendapatkan informasi di mana ayah,” kata Abdullah tersenyum kecut.

Selama sebulan dua bulan, keluarga Abdullah masih meyakini ayah mereka masih ada. Bahkan mereka harus mengunjungi orang pintar untuk menemukan keberadaannya. Namun, ketika sudah berbulan-bulan tak ditemukan, mereka mulai pasrah.

Kehilangan sang ayah akibat konflik menyebabkan Abdullah trauma. Dia masih sering mimpi buruk. Melihat bagaimana ayahnya diseret keluar rumah dan mobil berkaca gelap itu menderu pergi. “Mungkin saya trauma, apalagi saat itu usia saya masih 19 tahun,” kata Abdullah.

Tidak ke psikiater
Baik Hasbi dan Abdullah tidak pernah mengunjungi psikiater. Mereka kebanyakan menghilangkan traumanya seiring waktu yang bergulir. Dan



Nurhayati:

Kalau dulu, jangankan keluar untuk mencari rezeki, kumpul-kumpul dengan teman di warung kopi saja takut. Takut terjebak kontak senjata.

juga mendekati diri pada Tuhan. “Ke psikiater? Makan saja sulit,” kata Nurhayati tertawa. Sedang Abdullah mengaku rasa traumanya mulai berkurang begitu perjanjian damai diteken. “Kalau dulu, keringat saya keluar bila melihat orang berseragam loreng,” katanya jujur.

Seperti Afganistan
Kondisi masyarakat yang trauma di Aceh pascakonflik sejak tahun 1976 memang tidak bisa dianggap enteng. Nurhayati dan Hasbi hanya segelintir orang Aceh yang mengalami masalah trauma yang berat akibat konflik. Jesse Grayman, Koordinator Psikososial dari International Organization of Migration (IOM) melalui survey-nya menemukan bahwa orang Aceh telah mengalami masalah trauma yang cukup tinggi. Baik pria maupun wanita di Aceh mengalami masalah trauma yang berbeda-beda menurut jenis kelamin. Dan itu setara dengan masyarakat di Afganistan dan bosnia pascakonflik.

IOM menggunakan sample sebanyak 596 orang dari 30 desa yang dijadikan penelitian di tiga kabupaten yang paling tinggi intensitas konfliknya yaitu Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara.

“Gejala psikososial pada kelompok penduduk ini luar biasa tinggi, setara dengan penduduk pascakonflik seperti di Bosnia dan Afganistan,” kata Grayman dalam seminar *Problematika Pemberdayaan Ekonomi bagi Mantan Kombatan dan Masyarakat yang Terkena Dampak Konflik*.

Pelayanan kesehatan mental
Dalam survey itu telah mengidentifikasi bahwa 65 persen dari keseluruhan sample ada dalam peringkat tinggi gejala depresi, dan 69 persen pada skala gejala kecemasan.

“Yang dibutuhkan adalah layanan kesehatan mental untuk menangani konsekuensi kesehatan mental dari konflik ini,” kata Grayman lagi.

Kendati demikian, survey juga menemukan bahwa masyarakat yang mengalami trauma tetap memiliki tekad yang tinggi untuk bertahan. “Mereka menanggulangi pengalaman traumatik itu dengan berdoa, berkonsultasi dengan ahli agama, mencari perawatan medis umum, termasuk berusaha melupakan apa yang telah terjadi,” kata Grayman. “Hampir tidak ada konsultasi dengan konsultan kesehatan mental.”

Grayman menambahkan bahwa penyediaan bantuan mata pencarian bagi masyarakat korban konflik adalah persyaratan kunci untuk menyelesaikan isu-isu trauma akibat konflik.



Abdullah :

Kalau dulu, keringat saya keluar bila melihat orang berseragam loreng.



Seorang konselor sedang memperagakan sebuah boneka untuk menghibur anak-anak yang mengalami trauma, di Lhoknga, Aceh Besar.

Hasil Survey

Mengalami pengalaman perang	78 %
Mengalami peristiwa harus melarikan diri dari bahaya	38 %
Wanita kehilangan suami	8 %
Kehilangan anak yang terbunuh	5 %
Keluarga atau teman diculik	33 %
Harta disita atau dimusnahkan	45 %
N: 596 orang	

■ Sumber International Organization of Migration (IOM)